

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
KELURAHAN GN. SAMARINDA BARU**



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)
TAHUN 2014**

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
KELURAHAN GN. SAMARINDA BARU**



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)
TAHUN 2014**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat rahmat serta hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Gunungsamarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara untuk tahun anggaran 2014 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat yang mengemban tugas dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Penulisan Lakip 2014 ini adalah merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) 2011 – 2016 yang sebelumnya telah disusun. Penyusunan Lakip 2014 adalah kesinambungan sebelumnya dari penyusunan Lakip 2013.

Bimbingan dan pembinaan yang telah diberikan dari pejabat pemerintah Kota dan pihak-pihak lain serta dukungan dan kerja keras dari staf merupakan nilai yang sangat tinggi, sehingga kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Dukungan dan bimbingan dari segala pihak masih kami harapkan untuk peningkatan mutu kami ke depan di segala bidang.

Balikpapan, 05 Januari 2015

Kelurahan Gunungsamarinda Baru

MINDA NANTI
Penata
NIP. 19840527 20022 2 003

KATA PENGANTAR

Dengan mengabdikan diri sebagai tenaga kependidikan di lingkungan Universitas ... kami dapat menyelesaikan penelitian ... Akademi Kajian ... (AKIP) ... tahun anggaran 2014 ...

Penelitian ini adalah merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renas) 2011 - 2016 yang sebelumnya telah diamanatkan ...

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode ... yang telah dibuktikan dan ...

Ditujukan dan diharapkan dari segala pihak ...

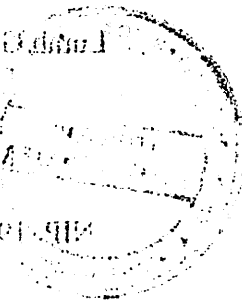
Balikpapan, 02 Januari 2015

Universitas ...

... KAJIAN ...

... ..

... ..





RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Inpres No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan instansi dengan Eselon II ke atas untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana Lakip adalah salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan paradigma tersebut.

Menyadari itu dan sejalan dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan bahwa LAKIP juga diwajibkan bagi instansi di bawah eselon II , Kelurahan Gunungsamarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara selaku ujung tombak pelayanan pemerintah pada masyarakat di wilayah Kelurahan Gunungsamarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara menyadari bahwa untuk melaksanakan kegiatannya secara transparan dan akuntabel diperlukan suatu media pertanggungjawaban akuntabilitas Hal tersebut mendasari disusunnya Dokumen Perencanaan Strategik (Renstra) Kelurahan Gunungsamarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2011 sampai dengan 2016.

Dalam tahun 2014 ini Kantor Kelurahan Gunungsamarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara telah berusaha mencapai 7 (Tujuh) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas dan pelayanan terhadap masyarakat
2. Peningkatan peran serta RT dan masyarakat
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
4. Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman
5. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
6. Meningkatnya kesehatan Ibu, Bayi dan Balita
7. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan

Dengan adanya LAKIP ini, diharapkan dapat menjadi salah satu alat evaluasi guna meningkatkan peran Kelurahan Gunungsamarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara guna mendukung terciptanya “ Good Governance “ atau pemerintahan yang baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat.

REKOMENDASI

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan ke arah transparansi dan
kelembutan yang partisipatif dan akuntabel yang bertujuan pada meningkatkan
peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya maka Pemerintah
mengemukakan dalam Laporan No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
yang mewajibkan instansi dengan Eselon II ke atas untuk menyajikan Laporan
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Kerja Instansi
Administrasi Negara Nomor : 230/KR/2003 tanggal 25 April 2003. Kemudian
Atas Perintah Presiden Negara (dan reformasi birokrasi Nomor 29 tahun 2010
tentang Reformasi Birokrasi) dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah (KUMH) Nomor 11 tahun 2011 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah diarahkan bahwa setiap instansi pemerintahan harus menyajikan
laporan dan menyajikan pertanggungjawaban tersebut.

Menyebut ini dan sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Kata Belkappa bahwa LAKIP juga diwajibkan bagi instansi di bawah Eselon II.
Kelembutan dan transparansi dalam Laporan Belkappa harus selalu diupayakan untuk
kelembutan pemerintah pada masyarakat di wilayah Kelembutan dan Transparansi dalam
Kelembutan Belkappa harus menyadari bahwa untuk melaksanakan kebijakannya secara
transparan dan akuntabel dibutuhkan suatu media pertanggungjawaban akuntabilitas dan
tersebut tersebut diantaranya Dokumen Pertanggungjawaban (Dokumen Pertanggungjawaban dan Kelembutan
dan Transparansi) dalam Kelembutan Belkappa Unit Tahun 2011 sebagai bagian dari
Laporan tahun 2014 ini Kantor Kelembutan dan Transparansi dalam Kelembutan

Belkappa Unit telah berusaha mencapai 7 (tujuh) sasaran yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap masyarakat
2. Meningkatkan peran serta RT dan masyarakat
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan
perencanaan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan keadilan lingkungan pemerintahan
5. Meningkatkan partisipasi dan keadilan dalam masyarakat
6. Meningkatkan kesadaran dan daya bela diri
7. Meningkatkan kemampuan dan ketahanan lingkungan

Dengan adanya LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu alat evaluasi guna
meningkatkan peran Kelembutan dan Transparansi dalam Kelembutan Belkappa Unit
guna mencapai keadilan "Good Governance" dan pemerintahan yang baik yang
akhirnya bertujuan pada terlaksananya pembangunan yang lebih maju.



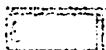
DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Aspek Strategis	8
D. Struktur Organisasi	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB. II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	
1. Visi Dan Misi	9
2. Tujuan dan Sasaran	11
3. Strategi Dan Kebijakan	12
4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014	14
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	15
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014	15
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA	19
B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN	26
BAB. IV PENUTUP	28
Lampiran:	
1. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)	
2. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2014	
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2014	

DAFTAR ISI

Halaman

1	KATA PENGANTAR
2	REKAMASAN BERSEKUTU
3	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
4	A. Latar Belakang
4	B. Tugas Pokok dan Fungsi
8	C. Aspek Strategis
8	D. Struktur Organisasi
9	E. Sistematisa Penelitian
	BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
	A. RENCANA STRATEGIS
9	1. Visi Dan Misi
11	2. Tujuan dan Sasaran
12	3. Strategi Dan Kebijakan
14	4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014
12	B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
12	C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
19	A. PENGINGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA
24	B. PENGINGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA
28	BAB IV PENUTUP
	lampiran:
1	SK Indikator Kinerja Utama (IKU)
2	Penetapan Penetapan Kinerja Tahun 2014
3	Pengukuran Kinerja Tahun 2014





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja dan alat pendorong terwujudnya good governance, bahkan LAKIP juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Kelurahan Gunungsamarinda Baru sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Kota Balikpapan, turut berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban yang dituangkan dalam LAKIP Kelurahan Gunungsamarinda Baru Tahun 2014.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Kelurahan, Kelurahan Gunungsamarinda Baru mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh walikota, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan;
- d. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kelurahan;
- g. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan kelurahan;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- c. Melaksanakan pengelolaan keuangan kantor;
- d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- e. Menyiapkan dan memproses usulan diklat aparatur kelurahan;
- f. Melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan keamanan kantor;

DAFTAR ISI

A. Latar Belakang

Keberhasilan pelaksanaan KAKW sangat ditentukan oleh kemampuan KAKW dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Keberhasilan KAKW juga ditentukan oleh kemampuan KAKW dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Keberhasilan KAKW juga ditentukan oleh kemampuan KAKW dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

B. Tujuan dan Fungsi

Keberhasilan KAKW sangat ditentukan oleh kemampuan KAKW dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Keberhasilan KAKW juga ditentukan oleh kemampuan KAKW dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan
 - c. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien
 - d. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien
 - e. Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien
 - f. Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien
 - g. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien
 - h. Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien
 - i. Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien
1. Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien
 2. Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien
 3. Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien
 4. Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien
 5. Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien
 6. Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien
 7. Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien
 8. Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien
 9. Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien
 10. Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien



- g. Melaksanakan tertib administrasi, dokumentasi dan kearsipan;
- h. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- i. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- j. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan di wilayah kelurahan;
- d. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi/surat keterangan dilingkup seksi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di kelurahan;
- f. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- g. Melaksanakan pembinaan Rukun Tetangga (RT) di wilayah kelurahan;
- h. Menyusun profil dan monografi kelurahan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum (PEMILU) di wilayah kelurahan;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan pemberian layanan di bidang ketentraman dan ketertiban serta pemberian layanan rekomendasi izin pertunjukan dan keramaian di wilayah kelurahan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kelurahan;
- d. Melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan data eks. G.30.S.PKI;
- e. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian C dan Kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kelurahan;
- f. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan di bidang trantib, lingkungan hidup dan perizinan lainnya di wilayah kelurahan;
- i. Melaksanakan pemberian layanan administrasi perijinan yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban wilayah;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga masyarakat, tokoh agama, LSM, RT;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- g. Melakukan terbit administrasi dokumentasi dan kearsifan
 - h. Melakukan pengadaan, pembelian sarana prasarana kantor dan perlengkapan administrasi barang
 - i. Melakukan tugas kelurahan dan keprotokolan
 - j. Menyusun dan melaksanakan kegiatan kebidanan
 - k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan
 - l. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Sebelum pemerintahan dipinjam oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemerintahan
 - b. Melakukan kegiatan program di bidang pemerintahan
 - c. Melakukan pembinaan administrasi kebidanan dan administrasi kesehatan di wilayah kelurahan
 - d. Melakukan pembinaan layanan kebidanan dan kesehatan di tingkat seksi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - e. Melakukan pembinaan lembaga-lembaga komasyarakat di kelurahan
 - f. Melakukan terbit administrasi dan pelayanan kebidanan
 - g. Melakukan pembinaan Kader Terpadu (RT) di wilayah kelurahan
 - h. Menyusun profil dan anggaran tahunan
 - i. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan kebidanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Sebelum pemerintahan Kelurahan dan Lingkungan Hidup dipinjam oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
- a. Menyusun program dan kegiatan pemerintahan dan lingkungan hidup
 - b. Melakukan pembinaan layanan di bidang pemerintahan dan kesehatan serta pembinaan layanan kebidanan ini bertujuan dan pembinaan di wilayah kelurahan
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintahan dan kesehatan wilayah kelurahan
 - d. Melakukan pengadministrasian dan pelaporan data s.d. (D.20.2.3.K1)
 - e. Melakukan pengawasan untuk terdapat kegiatan masyarakat lingkungan
 - f. Melakukan laporan C dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki pembinaan di wilayah kelurahan
 - g. Melakukan monitoring dan pengabdian kesehatan lingkungan di wilayah kelurahan
 - h. Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara pemerintahan Kelurahan dan Kesehatan lingkungan hidup
 - i. Menyelenggarakan rapat koordinasi permasalahan di bidang kesehatan lingkungan dan pembinaan lainnya di wilayah kelurahan
 - j. Melakukan pembinaan layanan administrasi kebidanan yang berhubungan dengan kesehatan dan keluarga lainnya
 - k. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga masyarakat, tokoh agama, LAM, RT
 - l. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi
 - m. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Seksi Pembangunan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pembangunan di wilayah kelurahan;
- b. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan bersama dengan LPM;
- c. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) di wilayah kelurahan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
- f. Melaksanakan pembinaan penataan pembangunan permukiman penduduk di wilayah kelurahan;
- g. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan;
- h. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan perekonomian dan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang kesejahteraan social;
- b. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan social sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama di wilayah kelurahan;
- d. Melaksanakan pendataan terhadap masyarakat yang rentan masalah sosial dan keluarga miskin di wilayah kelurahan;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan social di wilayah kelurahan;
- f. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan / program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berenana di wilayah kelurahan;
- i. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha-usaha kesejahteraan rakyat dan penanggulangan korban bencana alam;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan usaha kesejahteraan rakyat;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seksi Pembangunan Masyarakat dipinpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah. Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kelurahan
- c. Melaksanakan kebijakan masyarakat kelurahan bersama dengan U.P.K.
- d. Melaksanakan kebijakan kepada masyarakat di bidang usaha ekonomi
- e. Melaksanakan pembinaan dan pembangunan
- f. Melaksanakan pembinaan dan pembangunan
- g. Melaksanakan pembinaan dan pembangunan
- h. Melaksanakan pembinaan dan pembangunan
- i. Melaksanakan laporan pelaksanaan kegiatan seksi
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Seksi Kesejahteraan Sosial dipinpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial
- b. Melaksanakan pemberian layanan rekombendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Memfasilitasi pembinaan ketekunan hidup antar warga dan antar umat beragama di wilayah kelurahan
- d. Melaksanakan pendataan terhadap masyarakat yang rentan masalah sosial dan keluarga miskin di wilayah kelurahan
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan program dan kegiatan kesejahteraan sosial di wilayah kelurahan
- f. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan
- h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan / program kesehatan masyarakat kesehatan ibu dan anak serta keluarga berenergi di wilayah kelurahan
- i. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha-usaha kesejahteraan rakyat dan pembangunan korban bencana alam
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan usaha kesejahteraan rakyat
- k. Melaksanakan laporan pelaksanaan kegiatan seksi
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku



C. Aspek Strategis

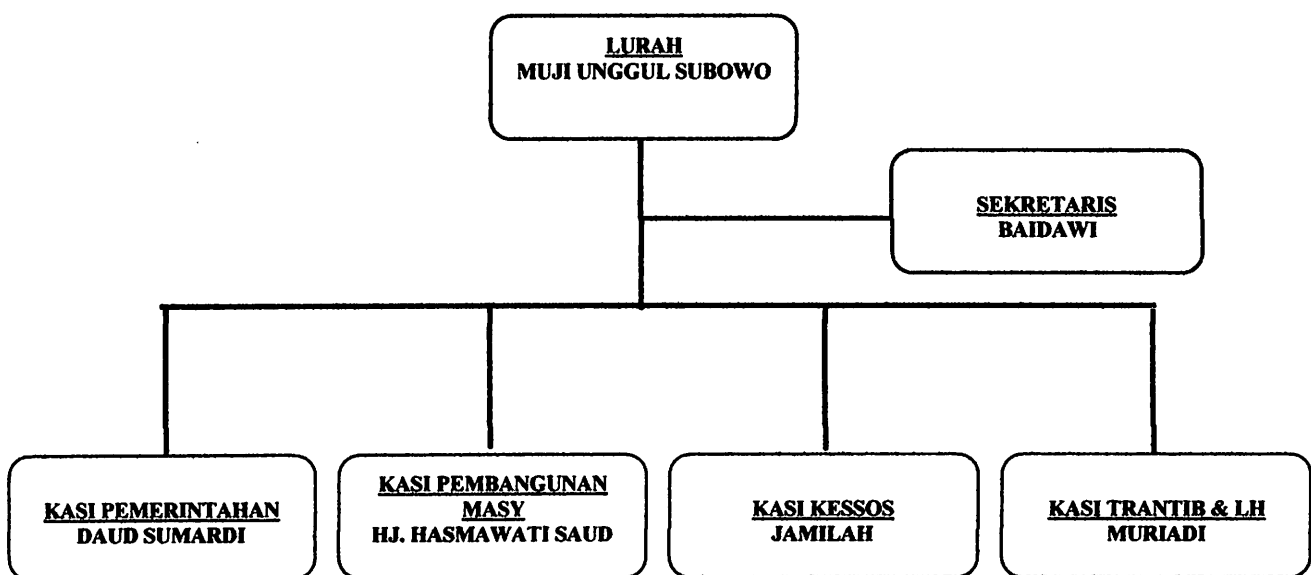
Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan terdapat Isu-isu Strategis yang ada di Kelurahan Gunungsamarinda Baru yaitu :

1. Penanganan Infrastruktur, penataan wilayah dan Lingkungan Hidup
2. Pembangunan Sumber daya Manusia
- 3..Membangun daya saing Perekonomian
- 4..Penanganan kemiskinan dan masalah sosial Kemasyarakatan
- 5..Kualitas Pelayanan Publik

D. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kantor Kelurahan Gunungsamarinda Baru Kecamatan BalikpapanUtara adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kelurahan Gunungsamarinda Baru



Sumber daya aparatur

Rincian secara lengkap Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Kantor Kelurahan Gunungsamarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Golongan			Pendidikan			
	I	II	III	SMP/SD	SMA	D1-D3	S1-S3
Lurah	-	-	1	-	-	-	1
Sekretaris	-	-	1	-	-	-	1
Kepala Seksi	-	-	4	-	3	1-	-
Staf	-	3	-	-	3	-	-
Tenaga Harian	-	-	-	-	-	-	-
Lepas	-	-	-	-	-	-	-
Tenaga	-	-	-	-	5	-	-
Kontrak/Naban	-	-	-	-	-	-	-

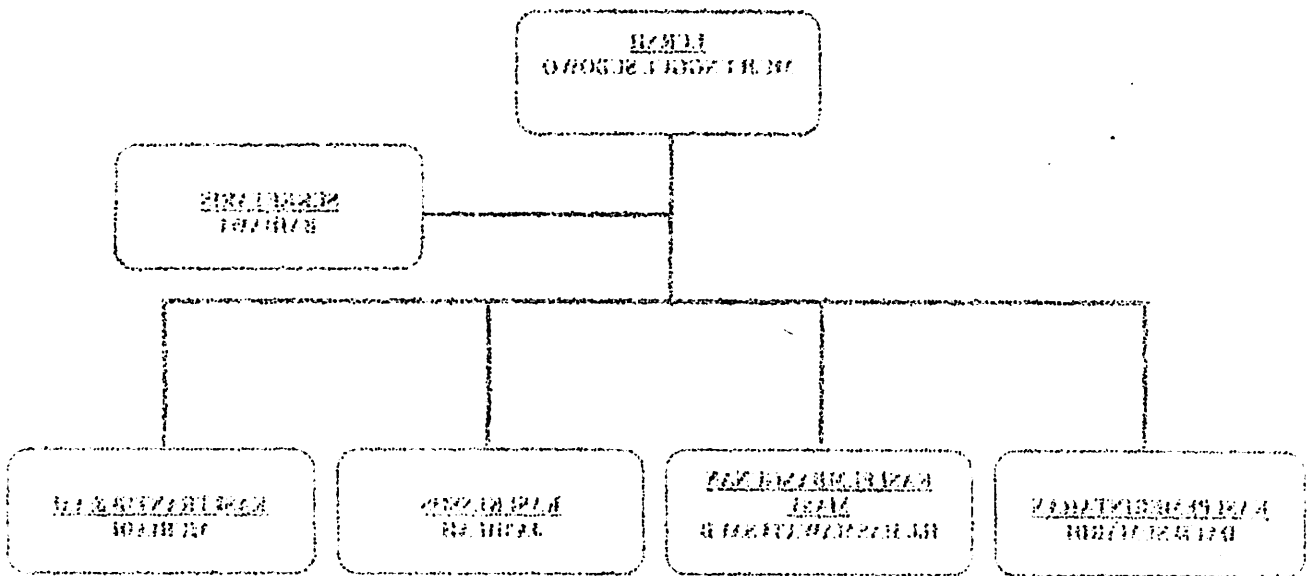
C. Aspek Strategis

- Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan terdapat aspek-aspek strategis yang yang ada di Kabupaten Gunungkidul antara lain :
1. Pembangunan infrastruktur, pemenuhan layanan dan peningkatan Hidup
 2. Pembangunan sumber daya Manusia
 3. Pembangunan daya saing Perekonomian
 4. Pembangunan keadilan dan masalah sosial Kesejahteraan
 5. Kualitas Pelayanan Publik

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kabupaten Gunungkidul Badan Kesatuan Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kantor Kabupaten Gunungkidul Badan Kesatuan Kesejahteraan Masyarakat



Sumber data sekunder

Rincian secara lengkap Struktur Daya Aparatur yang dimiliki Kantor Kabupaten Gunungkidul Badan Kesatuan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Golongan			Pendidikan		
	I	II	III	SMK	DI-III	SI-III
1. Bupati	-	-	I	-	-	I
2. Sekretaris	-	-	I	-	-	I
3. Kepala Seksi	-	-	4	3	1	-
4. Staf	-	3	-	3	-	-
5. Tenaga Harian	-	-	-	-	-	-
6. Sosis	-	-	-	-	-	-
7. Tenaga	-	-	-	3	-	-



Jumlah	-	3	6	-	11	1	2
---------------	---	----------	----------	---	-----------	----------	----------

E. Sistematika Penulisan

Lakip Kelurahan Gunungsamarinda Baru Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Latar Belakang, Tugas Pokok Dan Fungsi, Aspek Strategis, Struktur Organisasi, Sistrematika Penulisan.

BAB II RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA : Memuat Rencana Strategi (Renstra), Visi Dan Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014. Juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Penetapan Kinerja Tahun 2014.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA : Mencakup Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja dan Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

E. Sistem Akuntansi Penjualan

Lampiran Keluaran dan Anggaran Biaya Tahun 2014 disusun dengan

sistem akuntansi sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN	:	Latar Belakang, Tujuan Pokok dan Fungsi, Aspek Strategis, Struktur Organisasi, Sistem Akuntansi Penjualan.
BAB II	RENCANA STRATEGI DAN PENYUSUNAN KINERJA	:	Membuat Rencana Strategi (Renas), Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan Rencana Kinerja Tahunan 2014, juga membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Rencana Kinerja Tahunan 2014.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	:	Mencakup Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja dan Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP		



BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

1. VISI DAN MISI

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan. Suatu Visi bersifat menantang (challenge) mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Sejalan dengan visi Kota Balikpapan yaitu “MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN NYAMAN DIHUNI MENUJU MADINATUL IMAN”., Kelurahan Gunungsamarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara menetapkan visi sebagai berikut :

**Terwujudnya Masyarakat
Gunungsamarinda Baru yang
sejahtera dengan berbasis
Industri Rumah Tangga**

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Misi merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan

1. Mengutamakan pelayanan masyarakat yang prima
2. Meningkatkan aktifitas aparat kelurahan dalam pelayanan prima
3. Meningkatkan peranserta masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera
4. Meningkatkan mutu sekolah melalui manajemen sekolah dasar
5. Meningkatkan taraf hidup masyarakat keluarga miskin

2. TUJUAN DAN SASARAN

a. Penetapan Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi. Karakteristik Tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Idealis; berarti mengandung nilai – nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi berhasil

REVISI
REVISI STRATEGI DAN PERENCANAAN KEMUDA

(REVISI STRATEGI (REVISI))
REVISI STRATEGI

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berkaitan dengan
tujuan jangka panjang (visi) yang akan dicapai (tujuan) jangka panjang
yang akan dicapai. Visi yang ditetapkan harus dapat memberikan gambaran
tentang masa depan yang akan dicapai dan menggambarkan arah yang akan
dijalaninya untuk mencapai tujuan tersebut.

Salah satu visi yang ditetapkan oleh PERENCANAAN KEMUDA
DALAM RANGKAIAN STRATEGI DAN PERENCANAAN KEMUDA
adalah (tujuan jangka panjang) yang akan dicapai (tujuan) jangka panjang
yang akan dicapai.

REVISI STRATEGI DAN PERENCANAAN KEMUDA
REVISI STRATEGI DAN PERENCANAAN KEMUDA
REVISI STRATEGI DAN PERENCANAAN KEMUDA
REVISI STRATEGI DAN PERENCANAAN KEMUDA

REVISI

Salah satu visi yang ditetapkan oleh PERENCANAAN KEMUDA
adalah (tujuan jangka panjang) yang akan dicapai (tujuan) jangka panjang
yang akan dicapai.

- 1. Menetapkan visi yang akan dicapai
- 2. Menetapkan misi yang akan dicapai
- 3. Menetapkan strategi yang akan dicapai
- 4. Menetapkan program yang akan dicapai
- 5. Menetapkan indikator yang akan dicapai

REVISI STRATEGI DAN PERENCANAAN KEMUDA

Salah satu visi yang ditetapkan oleh PERENCANAAN KEMUDA
adalah (tujuan jangka panjang) yang akan dicapai (tujuan) jangka panjang
yang akan dicapai.



2. Jangkauan ke depan; yaitu dicapai dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan organisasi. Untuk Kelurahan Gunungsamarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara ditetapkan jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Abstrak; berarti tujuan belum dapat dikuantisir, melainkan menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang
4. Konsisten; tujuan harus konsisten sesuai dengan tupoksi organisasi

Untuk menjabarkan misi Kelurahan Gunungsamarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara dalam tahun 2011 s.d 2016 mendatang diarahkan untuk pencapaian tujuan masing – masing Misi sebagai berikut :

No	Misi	No	Tujuan Strategik
1	Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan dan kelembagaan	1.	Terciptanya tertib administrasi pemerintahan dan kelembagaan
2.	Meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan	2.	Terwujudnya kebersihan dan kesehatan lingkungan di wilayah Kelurahan
3.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	3.	Terciptanya masyarakat yang sejahtera
4	Meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan	4	Terciptanya suasana aman dan tertib di wilayah Kelurahan

b. Sasaran

Karakteristik Sasaran dapat digambarkan dengan SMART sebagai berikut :

- **Spesific**, yang berarti jelas dan spesifik menunjukkan sasaran apa yang ingin dicapai
- **Measurable**, yang berarti dapat diukur, sehingga memudahkan dalam penyusunan LAKIP dan evaluasinya
- **Acceptable**, yang berarti masih bisa dicapai oleh instansi yang bersangkutan
- **Result**, yang berarti berorientasi pada pencapaian hasil
- **Timeliness**, yang berarti dapat dicapai dalam hitungan waktu, misalnya tahunan, semesteran maupun triwulanan.

Sasaran dari masing – masing tujuan yang telah ditetapkan oleh Kelurahan Gunungsamarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara untuk tahun 2014 adalah :

No	Tujuan Strategik	No	Sasaran Strategik
1.	Terciptanya tertib administrasi pemerintahan dan kelembagaan	1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kepada Masyarakat
		2.	Peningkatan peran serta RT dan Masyarakat
2	Terwujudnya kebersihan dan kesehatan lingkungan di wilayah Kelurahan	3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan pembangunan
		4	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan

2. Pelaksanaan ke depan yang dapat diukur dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan organisasi. Untuk Kelembagaan dan Tata Kelola Badan Penyelenggara Pendidikan dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Aspek yang menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan organisasi adalah sebagai berikut yang telah ditetapkan di masa yang akan datang.
4. Kelembagaan dan Tata Kelola Badan Penyelenggara Pendidikan sebagai tolak ukur organisasi.

Untuk menetapkan nilai Kelembagaan dan Tata Kelola Badan Penyelenggara Pendidikan tahun 2011 s.d 2015 ditetapkan dengan cara sebagai berikut :

No	Indikator	No	Tujuan Strategis
1	Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas	1	Terdapatnya terdapat peningkatan dan profesionalitas
2	Meningkatkan kepatuhan dan keabsahan lingkungan	2	Terdapatnya kepatuhan dan keabsahan lingkungan di lingkungan
3	Meningkatkan kepatuhan kepatuhan	3	Terdapatnya kepatuhan yang kepatuhan
4	Meningkatkan kepatuhan dan keabsahan lingkungan	4	Terdapatnya kepatuhan dan keabsahan lingkungan

1. Indikator yang menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan organisasi adalah sebagai berikut yang telah ditetapkan di masa yang akan datang.
2. Aspek yang menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan organisasi adalah sebagai berikut yang telah ditetapkan di masa yang akan datang.
3. Kelembagaan dan Tata Kelola Badan Penyelenggara Pendidikan sebagai tolak ukur organisasi.
4. Kelembagaan dan Tata Kelola Badan Penyelenggara Pendidikan sebagai tolak ukur organisasi.
5. Kelembagaan dan Tata Kelola Badan Penyelenggara Pendidikan sebagai tolak ukur organisasi.
6. Kelembagaan dan Tata Kelola Badan Penyelenggara Pendidikan sebagai tolak ukur organisasi.

Kelembagaan dan Tata Kelola Badan Penyelenggara Pendidikan tahun 2011 s.d 2015 ditetapkan dengan cara sebagai berikut :

No	Indikator	No	Tujuan Strategis
1	Terdapatnya terdapat peningkatan dan profesionalitas	1	Meningkatkan kepatuhan dan keabsahan lingkungan
2	Meningkatkan kepatuhan dan keabsahan lingkungan	2	Meningkatkan kepatuhan dan keabsahan lingkungan
3	Meningkatkan kepatuhan dan keabsahan lingkungan	3	Meningkatkan kepatuhan dan keabsahan lingkungan
4	Meningkatkan kepatuhan dan keabsahan lingkungan	4	Meningkatkan kepatuhan dan keabsahan lingkungan



			pemukiman
3	Terciptanya masyarakat yang sejahtera	5 6	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesehatan Ibu, Bayi dan Balita
4	Terciptanya suasana aman dan tertib di wilayah Kelurahan	7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan

3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara yang dilakukan mencapai tujuan dan sasaran, yang meliputi Kebijakan dan Program

Kebijakan

Dari konsep Kebijakan dapat diberikan definisi yang menyangkut Kebijakan dan Kebijakan Publik. Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (Pejabat, Kelompok, Instansi Pemerintah) atau serangkaian indikator dalam suatu bidang tertentu untuk dijadikan acuan atau pedoman dalam suatu kegiatan yang berbentuk perubahan, pengembangan serta dalam pelaksanaan program-program.

Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran –saluran birokrasi melainkan lebih dari itu menyangkut masalah-masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan kebijakan.

Beberapa Kebijakan yang dituangkan dalam program kegiatan Pemerintah Kelurahan Gunungsamarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara meliputi sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan dan dorongan kepada aparatur untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat
2. Memberi motivasi kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan
3. Memberikan bimbingan dan motivasi kepada masyarakat agar menjadi mandiri dan produktif
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Program

Program merupakan proses awal secara global dari suatu Rencana kegiatan tertentu yang disusun secara sistematis untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan yang diinginkan guna mendapatkan hasil yang maksimal dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Beberapa program Kelurahan Gunungsamarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara untuk Tahun 2014 yang meliputi :

- Bidang Pemerintahan
- Bidang Pembangunan

4	Terciptanya suasana aman dan tertib di wilayah Kelurahan	7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan
3	yang sejahtera	6	Meningkatnya kesehatan ibu, Bayi dan Balita
2	Terciptanya masyarakat	5	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
			berkemajuan

3. STRATEGI DAN KERANGKA

Strategi merupakan cara yang dilakukan mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi Kebijakan dan Program

Kebijakan

Dari konsep Kebijakan dapat diberikan definisi yang merupakan Kebijakan dan Kebijakan Publik. Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (Pemerintah, Kelompok Instansi Pemerintah) atau serangkaian indikator dalam suatu bidang tertentu untuk dijadikan acuan atau pedoman dalam suatu kegiatan yang berbentuk perubahan, pengembangan serta dalam pelaksanaan program-program.

Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar beres-bereskan atau dengan mekanisme pelaksanaan keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin dalam suatu birokrasi melainkan lebih dari itu merupakan masalah-masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan kebijakan.

Beberapa Kebijakan yang diuraikan dalam program kegiatan Kelurahan Kecamatan Gunungsumbita Baru Kecamatan Balikpapan Utara meliputi sebagai berikut :

1. Meningkatkan himpunan dan dorongan kepada aparat untuk meningkatkan pengabdian dan ketertarikan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat
2. Memberi motivasi kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan
3. Meningkatkan himpunan dan motivasi kepada masyarakat agar menjadi mandiri dan produktif
4. Mendukung masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Program

Program merupakan proses atau secara global dari suatu Rencana kegiatan tertentu yang disusun secara sistematis untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan yang diinginkan guna mendapatkan hasil yang maksimal dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Beberapa program Kelurahan Kecamatan Gunungsumbita Baru Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2014 yang meliputi :

- a. Bidang Pembangunan
- b. Bidang Pemerintahan



□ Bidang Kemasyarakatan

Ketiga Bidang tugas Pemerintah Kelurahan tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Program-program sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4) Program Lingkungan Hidup
- 5) Program Pembinaan Organisasi Kelurahan
- 6) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- 7) Program Lingkungan Sehat Perumahan
- 8) Program Pengembangan Data/Informasi
- 9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 10) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 11) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 12) Program Penataan Administrasi Kependudukan
- 13) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- 14) Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal

Kegiatan

Kegiatan merupakan implementasi dari program. Penjabaran program dalam kegiatan – kegiatan akan dituangkan dalam rencana kinerja tahunan yang disusun setiap tahun. Selanjutnya, dari rencana kinerja tahunan inilah yang akan dipertanggungjawabkan dalam LAKIP agar dapat diperoleh gambaran tingkat pencapaian / keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif .

Kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 3) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 8) Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
- 9) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- 10) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 11) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
- 12) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas
- 14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 16) Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT
- 17) Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT terbaik tingkat Kelurahan
- 18) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi Sosial kepada Masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah
- 19) Fasilitasi penyelenggaraan posyandu di Kelurahan
- 20) Penyusunan Profil Kelurahan
- 21) Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan
- 22) Kerja Bhakti Massal di wilayah Kelurahan
- 23) Pengawasan dan Pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP Pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin

Bidang Kearsifan dan Kelembutan

Kelembutan sebagai bentuk kearifan lokal merupakan salah satu identitas yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten

- 1) Program Pengembangan Kelembutan
- 2) Program Pengembangan Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 3) Program Pengembangan Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 4) Program Pengembangan Kelembutan
- 5) Program Pengembangan Kelembutan
- 6) Program Pengembangan Kelembutan
- 7) Program Pengembangan Kelembutan
- 8) Program Pengembangan Kelembutan
- 9) Program Pengembangan Kelembutan
- 10) Program Pengembangan Kelembutan
- 11) Program Pengembangan Kelembutan
- 12) Program Pengembangan Kelembutan
- 13) Program Pengembangan Kelembutan
- 14) Program Pengembangan Kelembutan

Kelembutan

Kelembutan merupakan implementasi dari program kearifan lokal yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten

Kelembutan yang ditetapkan dan dilaksanakan mulai tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 2) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 3) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 4) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 5) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 6) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 7) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 8) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 9) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 10) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 11) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 12) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 13) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 14) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 15) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 16) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 17) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 18) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 19) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 20) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 21) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 22) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi
- 23) Program Kelembutan dan Kelembutan Apresiasi



- 24) Pengelolaan pengangkutan sampah dan kebersihan drainase
- 25) Pemutakhiran Data Penduduk Kota Balikpapan terkait Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial
- 26) Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan
- 27) Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an
- 28) Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di wilayah Kecamatan dan Kelurahan
- 29) Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan
- 30) Sarana kesekretariatan PPK dan PPS dalam rangka pemilihan Pilgub Kaltim 2013 dan Pemilu Legislatif/Pilpres 2014.

4 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 yang telah disusun dan menjadi acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase keluhan atas Pelayanan yang ditindaklanjuti 2. Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan 3. Jumlah Surat Pengantar /Keterangan Bidang Pelayanan	12 keluhan/tahun 10 menit/surat 9250 surat
2. Peningkatan Peran Serta RT dan Masyarakat	1. Persentase kehadiran pada rapat Koordinasi RT 2 RT yang mengelola administrasi dengan baik	25 orang 26 RT
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan & pembangunan	1. Jumlah dana Partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2 Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	Rp 2.225.000.000 100 orang
4. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS 3. Jumlah Bank Sampah	20 RT 3523 KK 0 Unit
5. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Jumlah Keluarga Miskin 2 Jumlah UMKM 3 Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif 4 Jumlah Peserta Lomba STQ 5 Jumlah Anak Putus Sekolah	56 KK 115 28 orang 30 orang 0
6. Meningkatnya kesehatan Ibu, bayi dan balita	1. Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk 2. Angka Kematian Balita 3. Angka Kematian Ibu Melahirkan 4 Jumlah Peserta KB 5 Jumlah Posyandu Aktif	0 0 0 5563 PUS 26 Unit
7. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah keaktifan pos kamling 2. Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	26 RT 0

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan indikator pencapaian sasaran. Indikator sasaran ini antara lain digunakan untuk memudahkan perhitungan kinerja pada penyusunan LAKIP setiap tahunnya.

Indikator kinerja masing – masing sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 34) Pengelolaan lingkungan sekitar dan kebersihan daerah
- 35) Perolehan Data Produk Kota Balikpapan untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial
- 36) Perolehan dan Fasilitas pengembangan rumah dan fungsi PDK Kelurahan
- 37) Fasilitas Pengembangan Sekolah Dasar dan PDK Kelurahan
- 38) Koordinasi dan Pengembangan Ketertarikan dan Keterlibatan warga di wilayah Kecamatan dan Kelurahan
- 39) Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan
- 30) Rangka Kerja Strategis PPK dan PPS dalam rangka pemilahan Pilgub Kalimantan 2013 dan Pemilu Legislatif Pilgub 2014.

4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 yang telah disusun dan menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut :

Urutan	Indikator Kinerja	Strategi
1	1. Perolehan dan Fasilitas pengembangan rumah dan fungsi PDK Kelurahan 2. Fasilitas Pengembangan Sekolah Dasar dan PDK Kelurahan 3. Koordinasi dan Pengembangan Ketertarikan dan Keterlibatan warga di wilayah Kecamatan dan Kelurahan	1. Mengembangkan Fasilitas dan Fasilitas yang sesuai kebutuhan warga
2	1. Perolehan dan Fasilitas pengembangan rumah dan fungsi PDK Kelurahan 2. Fasilitas Pengembangan Sekolah Dasar dan PDK Kelurahan	1. Mengembangkan Fasilitas dan Fasilitas yang sesuai kebutuhan warga
3	1. Fasilitas Pengembangan Sekolah Dasar dan PDK Kelurahan 2. Fasilitas Pengembangan Sekolah Dasar dan PDK Kelurahan	1. Mengembangkan Fasilitas dan Fasilitas yang sesuai kebutuhan warga
4	1. Fasilitas Pengembangan Sekolah Dasar dan PDK Kelurahan 2. Fasilitas Pengembangan Sekolah Dasar dan PDK Kelurahan	1. Mengembangkan Fasilitas dan Fasilitas yang sesuai kebutuhan warga
5	1. Fasilitas Pengembangan Sekolah Dasar dan PDK Kelurahan 2. Fasilitas Pengembangan Sekolah Dasar dan PDK Kelurahan	1. Mengembangkan Fasilitas dan Fasilitas yang sesuai kebutuhan warga
6	1. Fasilitas Pengembangan Sekolah Dasar dan PDK Kelurahan 2. Fasilitas Pengembangan Sekolah Dasar dan PDK Kelurahan	1. Mengembangkan Fasilitas dan Fasilitas yang sesuai kebutuhan warga
7	1. Fasilitas Pengembangan Sekolah Dasar dan PDK Kelurahan 2. Fasilitas Pengembangan Sekolah Dasar dan PDK Kelurahan	1. Mengembangkan Fasilitas dan Fasilitas yang sesuai kebutuhan warga

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan indikator pencapaian sasaran. Indikator sasaran ini antara lain digunakan untuk menjabarkan keberhasilan kinerja pada pencapaian IAKIP setiap tahunnya.

Indikator kinerja masing – masing – sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut:



Sasaran		Indikator Kinerja		Sumber Data
1		2		3
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1	Prosentase keluhan atas pelayanan yang ditindaklanjuti	Surat keluhan di kotak saran atau kotak aduan Buku-buku register pelayan
		2	Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan	
		3	Jumlah surat pengantar/keterangan bidang pelayanan	
2.	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Kelurahan dan Ketua RT	1	Prosentase kehadiran pada Rapat Koordinasi RT	Laporan Pelaksanaan kegiatan
		2	Prosentase RT yang mengelola administrasi RT dengan baik	
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan pembangunan	1	Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan	Laporan Pelaksanaan kegiatan
		2	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan	
4	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	1	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	Laporan Pelaksanaan kegiatan
		2	Jumlah KK yang menerapkan PHBS	
		3	Jumlah Bank Sampah	
5	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	1	Jumlah Keluarga Miskin	Laporan Pelaksanaan kegiatan
		2	Jumlah UMKM	
		3	Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif	
		4	Jumlah peserta	



Sasaran		Indikator Kinerja		Sumber Data
1		2		3
			Lomba STQ	
6	Meningkatnya kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	1	Jumlah anak putus sekolah	Laporan Pelaksanaan kegiatan
		2	Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk	
		3	Angka kematian Balita	
		4	Jumlah Peserta KB	
		5	Jumlah Posyandu aktif	
		6	Angka kematian Ibu melahirkan	
7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1	Jumlah keaktifan Pos Kamling	Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan masyarakat
		2	Angka kriminalitas di wilayah kelurahan	

C PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Pada dasarnya Penetapan Kinerja Tahun 2014 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kelurahan Gunungsamarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara selama tahun 2014. Penetapan kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2014 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan.

Penetapan kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Sedangkan Penetapan kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja Tahun 2014 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Untuk tahun 2014, Kantor Kelurahan Gunungsamarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara menetapkan 7 (Tujuh) Sasaran yang hendak dicapai. Sasaran dan ikhtisar target kinerja masing – masing sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2014 adalah, sebagai berikut :

No. Urut	Indikator Kinerja	Sasaran
	Lampiran 2.10	
1. Peningkatan Kualitas Layanan dan Akses Masyarakat	1. Jumlah bank di wilayah 2. Jumlah layanan bank 3. Angka kreditasi 4. Jumlah transaksi KB 5. Jumlah pos layanan 6. Angka kreditasi per kecamatan	1. Peningkatan kualitas layanan dan akses masyarakat
2. Peningkatan Kualitas dan Keberlanjutan Kegiatan	1. Jumlah kegiatan per kecamatan 2. Angka kreditasi di kecamatan 3. Jumlah kegiatan	1. Peningkatan kualitas dan keberlanjutan kegiatan

C. PENYAJIAN KINERJA TAHUN 2014

Terdapat beberapa pencapaian kinerja tahun 2014 yang signifikan yang telah dicapai oleh Kantor Kecamatan Gunungsumbitra Barat Kecamatan Balikpapan tahun 2014. Pencapaian kinerja yang signifikan ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 dari semua indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kegiatan.

Pencapaian kinerja pada tingkat sasaran akan diberikan secara berkala dengan mengacu pada indikator yang terdapat di dalam rencana strategis ini. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2014 telah tercapai dan efektifitas kegiatan.

Terdapat tahun 2014 Kantor Kecamatan Gunungsumbitra Barat Kecamatan Balikpapan telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran yang terdapat dalam Rencana dan pelaksanaan target kinerja masing-masing yang telah ditetapkan dalam tahun 2014 adalah sebagai berikut :



Misi 1 : Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan dan Kelembagaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1	Prosentase keluhan atas pelayanan yang ditindaklanjuti	Keluhan /tahun	12
		2	Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan	Menit/ surat	10
2.	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Kelurahan dan Ketua RT	1	Jumlah surat keterangan bidang pelayanan	surat	9250
		2	Prosentase kehadiran pada Rapat koordinasi RT	Orang	26
		3	Jumlah RT dengan sistem administrasi RT yang baik	RT	26

Misi 2 : Meningkatkan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan pembangunan	1.	Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan	Rupiah	Rp.2.225.000.000,-
		2.	Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan	Orang	100
2.	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	1.	Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	RT	26
		2.	Jumlah Kepala Keluarga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	KK	3523
		3.	Jumlah Bank Sampah	Unit	0

Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5

Misi 1 : Meningkatkan Tumbuh Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	1. Meningkatkan Kualitas dan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Prosesase keluhan atau tanggapan yang diindaklanjuti	Keluhan Admin	12
		2. Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar-surat keterangan	Waktu surat	10
2	2. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Kelurahan dan Kota RT	1. Jumlah surat keterangan pindah yang pelayanan	surat	9250
		2. Prosesase kehadiran pada Rapat koordinasi RT	Orang	20
		3. Jumlah RT dengan sistem administrasi RT yang baik	RT	20

Misi 2 : Meningkatkan Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Kejadian	100
		2. Jumlah peserta yang ikut dalam perencanaan pembangunan	Orang	100
2	2. Meningkatkan kualitas kesehatan dan keselamatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CCH	RT	20
		2. Jumlah Kepala Keluarga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	KK	3223
		3. Jumlah Bank Sampah	Unit	0

Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1				



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	1. Jumlah Keluarga Miskin 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif 4. Jumlah peserta Lomba STQ 5. Jumlah anak putus sekolah	KK Buah Orang Orang Orang	56 115 28 30 0
2.	Meningkatnya kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	1. Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk 2. Angka kematian bayi/balita 3. Jumlah peserta program KB 4. Jumlah Posyandu aktif 5. Angka kematian Ibu melahirkan	Orang Orang PUS Buah Orang	0 0 5563 26 0

Misi 4 : Meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah keaktifan Pos Kamling 2. Angka kriminalitas di wilayah kelurahan	Buah kali	26 0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat		1. Jumlah Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)	Orang	5%
		2. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Orang	11%
		3. Jumlah Pengusaha Perempuan	Orang	3%
		4. Jumlah Peserta Lomba STQ	Orang	10%
		5. Jumlah Anak yang Sekolah	Orang	0%
2. Meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat		1. Jumlah penderita gangguan jiwa	Orang	0%
		2. Angka kematian jiwa	Orang	0%
		3. Jumlah peserta program PUS	Orang	100%
		4. Jumlah Pengusaha Perempuan	Orang	20%
		5. Angka kematian jiwa	Orang	0%

Tabel 4 : Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lingkungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lingkungan		1. Jumlah Kelembagaan Pos	Orang	10%
		2. Angka kematian jiwa	Orang	0%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilaia keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pengungkapan akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang merupakan penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir Penetapan Kinerja yang dilanjutkan dengan Pengukuran Kinerja. Hal ini mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1). Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), dan hasil (outcomes).

2). Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3). Evaluasi pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja

Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kelurahan Gunungsamarinda Baru Tahun 2011 – 2016 memiliki sasaran sebanyak 7 (tujuh) sasaran dan 22 (Dua Puluh Dua) inikator kinerja.

Adapun rincian indikator kinerja per misi adalah sebagai berikut :

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	1	2	5
2	1	2	5
3	1	2	10
4	1	1	2

BAB III ANALISIS KINERJA

Analisis kinerja adalah kegiatan untuk mengungkap secara sistematis mengenai pelaksanaan dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi pada tingkat yang mempunyai peranan strategis.

Analisis kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dan masing-masing kelompok indikator kinerja logis dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran. Pelaksanaan kinerja diukur melalui keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

A. PENYINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Peningkatan akuntabilitas kinerja dimulai dengan pelaksanaan kinerja yang menggunakan beberapa indikator kinerja dan beberapa capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir Laporan Kinerja yang diterbitkan dengan Keputusan Menteri. Hal ini mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam pasal 7 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Laporan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peningkatan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media format pelaksanaan kinerja.

Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah meningkatkan informasi yang lebih terperinci mengenai tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan.

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan secara sistematis indikator sasaran (input), kolaborasi (proses), dan hasil (outcome).

2. Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah suatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran indikator sasaran diidentifikasi dengan target kuantitatif dan selanjutnya untuk membandingkan pelaksanaan pencapaian sasaran.

3. Evaluasi pencapaian sasaran dan pelaksanaan kinerja

Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2011 - 2016 memiliki sasaran sebagai berikut (tabel 2.2 (Dua Belas Dua) indikator kinerja).

Adapun hasil indikator kinerja per misi adalah sebagai berikut :

Kategori	Tahun	Sasaran	Indikator Kinerja
1	1	2	2
2	1	2	2
3	1	2	10
4	1	1	2



Dari 7 (tujuh) sasaran dan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Kelurahan Gunungsamarinda Baru pada masing-masing Misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan dan Kelembagaan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian target	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1	Prosentase keluhan atas pelayanan yang ditindaklanjuti	Keluhan/tahun	12	0 keluhan masuk	100	
		2	Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan	Menit/surat	10	10	100	
2	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Kelurahan dan Ketua RT	3	Jumlah surat keterangan bidang pelayanan	surat	9250	4890	53	
		4	Prosentase kehadiran pada Rapat koordinasi RT	Orang	26	26	100	
		5	Jumlah RT dengan sistem administrasi RT yang baik	RT	26	15	51,72	

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap masyarakat diupayakan untuk dapat mengatasi seluruh keluhan yang masuk berkaitan dengan bidang pelayanan. Dari 2 keluhan yang masuk melalui kotak saran berkisar dari keluhan atas petugas pelayanan yang sudah berusia di atas 50 tahun, hal ini hanya dapat diatasi dengan memohon pengertian warga bahwa faktor usia tidak menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan karena yang bersangkutan sudah sangat berpengalaman. Rata-rata waktu penyelesaian ditargetkan sekitar 10 menit per surat, ternyata hal ini telah dapat dicapai namun proses penyelesaian berkas juga bergantung dari kelengkapan berkas dari warga dan permasalahan yang harus diatasi.

Pada Tahun 2014 tidak terdapat keluhan yang masuk melalui Kotak Saran/Kotak Pengaduan, . Pengaduan dan saran dari masyarakat untuk tahun 2014 dapat disalurkan melalui media manual yaitu Kotak Saran/Pengaduan

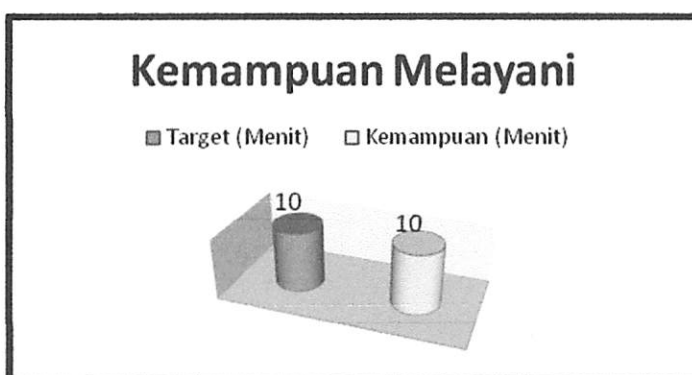
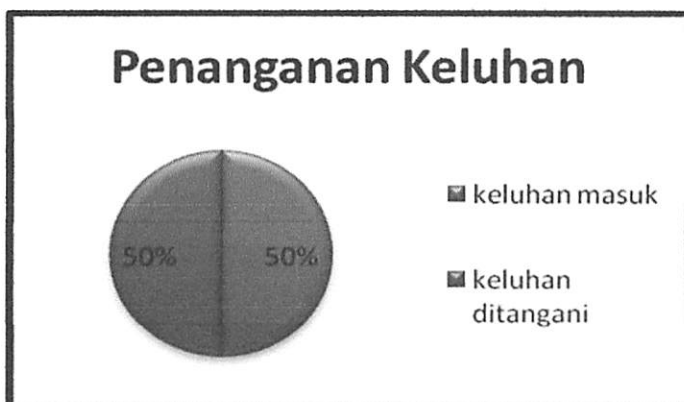
Dasar 7 (gaji) sesuai dan 25 (laba bersih) adalah indikator kinerja yang tercantum dalam laporan keuangan (manajemen laba) dan pada dasarnya masing-masing tidak dapat dianggap sebagai indikator kinerja.

Tabel 1 - Analisis Laporan Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberhasilan

No	Indikator Kinerja	Indikator Keberhasilan	Indikator Kinerja	Indikator Keberhasilan	Indikator Kinerja	Indikator Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7
1	Keuntungan	Keuntungan	Keuntungan	Keuntungan	Keuntungan	Keuntungan
2	Keuntungan	Keuntungan	Keuntungan	Keuntungan	Keuntungan	Keuntungan
3	Keuntungan	Keuntungan	Keuntungan	Keuntungan	Keuntungan	Keuntungan
4	Keuntungan	Keuntungan	Keuntungan	Keuntungan	Keuntungan	Keuntungan
5	Keuntungan	Keuntungan	Keuntungan	Keuntungan	Keuntungan	Keuntungan

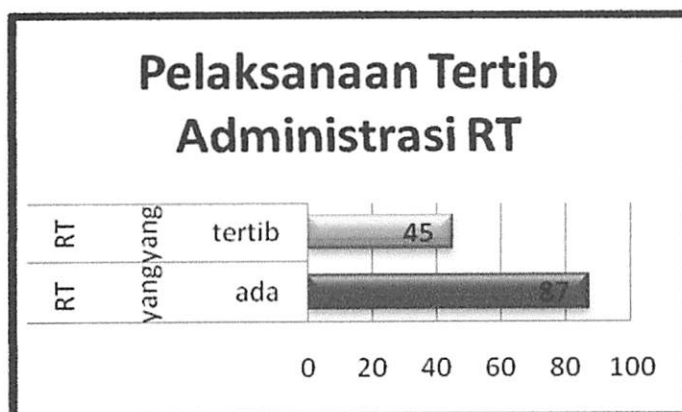
1. Meningkatkan kualitas dan efisiensi dan biaya yang terdapat yang terdapat...
 Dalam rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi dan biaya yang terdapat yang terdapat...
 untuk dapat meningkatkan efisiensi dan biaya yang terdapat yang terdapat...
 Dan 2. Laporan yang terdapat yang terdapat yang terdapat yang terdapat...
 dengan biaya yang terdapat yang terdapat yang terdapat yang terdapat...
 dengan prosedur yang terdapat yang terdapat yang terdapat yang terdapat...
 dalam memberikan pelayanan yang terdapat yang terdapat yang terdapat...
 karena waktu pelayanan terdapat yang terdapat yang terdapat yang terdapat...
 untuk dapat meningkatkan proses pelayanan yang terdapat yang terdapat...
 dengan biaya yang terdapat yang terdapat yang terdapat yang terdapat...
 dengan biaya yang terdapat yang terdapat yang terdapat yang terdapat...

Tahun 2014 tidak terdapat...
 terdapat yang terdapat yang terdapat yang terdapat yang terdapat...
 terdapat yang terdapat yang terdapat yang terdapat yang terdapat...
 terdapat yang terdapat yang terdapat yang terdapat yang terdapat...



2. Peningkatan peran serta RT dan masyarakat

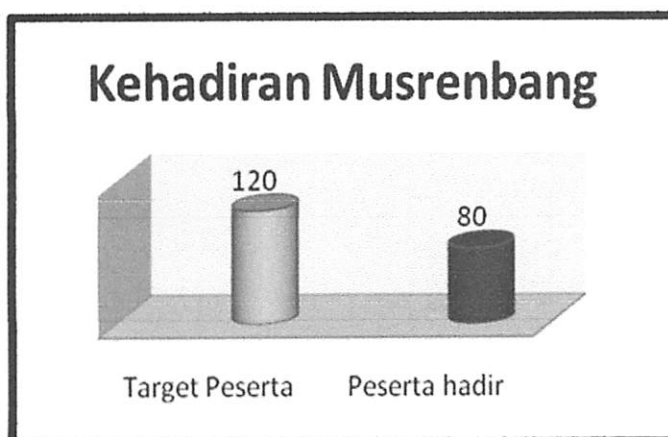
Peran RT senantiasa diupayakan untuk dapat meningkat setiap tahunnya khususnya dalam mendukung Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ternyata untuk Kegiatan pembinaan RT masih belum terpenuhinya RT yang memiliki dan menjalankan tertib administrasi. baik Administrasi Kependudukan maupun Administrasi Umum RT. Ketua RT telah dibekali dengan Buku-buku administrasi yaitu Buku Induk Penduduk, Buku Surat Masuk, Buku Surat Keluar, Buku Tanah, Buku Tamu, Buku Kekayaan dan Inventaris, Buku Pengurus RT, Buku Data Penduduk Pendetang Baru, Buku Data Penduduk Pendetang Sementara, Buku Rekapitulasi Data Kependudukan, Buku Kepengurusan Kependudukan RT dan Buku Kegiatan Swadaya Masyarakat. Ternyata dari 26 RT yang ada tidak seluruh RT yang mengisi buku administrasi tersebut. Berdasarkan hasil monitoring ternyata masih ada sekitar 9 RT yang tidak mengisi buku administrasi dengan baik dan lengkap. Sementara untuk pelaporan perkembangan penduduk RT, seharusnya dilaporkan oleh Ketua RT pada setiap akhir bulan.



Misi 2 : Meningkatkan kebersihan dan Kesehatan Lingkungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Penerimaan target	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan pembangunan	1 Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan	Rupiah	2.225.000.000,00	2.225.000.000,00	100	
		2 Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan	Orang	100	80	66,67	
2	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	1 Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	RT	26	51	58,62	
		2 Jumlah Kepala Keluarga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	KK	3523	2750	60,38	
		3 Jumlah Bank Sampah	Unit	0	0	0	

1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Partisipasi masyarakat senantiasa meningkat setiap tahunnya khususnya dalam kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing. Untuk kegiatan perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) jumlah peserta Musyawarah yang hadir hanya berkisar 66,67 % dari jumlah undangan yang ditargetkan. Walaupun demikian penyusunan Daftar Usulan Rencana Pembangunan tetap dapat berjalan dan mengakomodir kebutuhan yang ada di masyarakat.

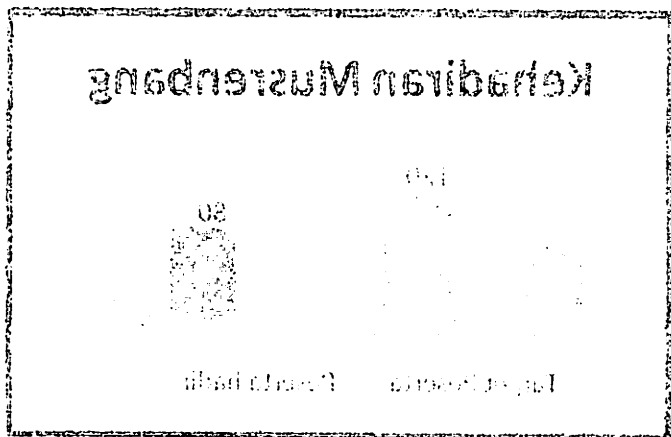


3. Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman RT yang menerapkan CGH hanya 20 RT dari 26 RT yang ada sedangkan penerapan PHBS untuk Tahun 2014 adalah sebagaimana daftar berikut :

Tabel 2 : Meningkatkan kesadaran dan kesehatan lingkungan

No	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	No Peran	Uraian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1. Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan 2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan	Kepala Orang	100 100	100 100	100	00.07
2	Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH 2. Jumlah Kepala Keluarga yang menerapkan Petakan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	RT KK	20 3222	21 3220	22.02	00.38
3	Jumlah Bank Sampah		Lini	0	0	0	0

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Partisipasi masyarakat senantiasa meningkat setiap tahunnya khususnya dalam kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing. Untuk kegiatan perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) jumlah peserta Musyawarah yang hadir hanya berkisar 60-70% dan jumlah undangan yang ditargetkan. Walaupun demikian penyusunan Daftar Usulan Rencana Pembangunan setiap dapat berjalan dan mengkomodifikasi kebutuhan yang ada di masyarakat.

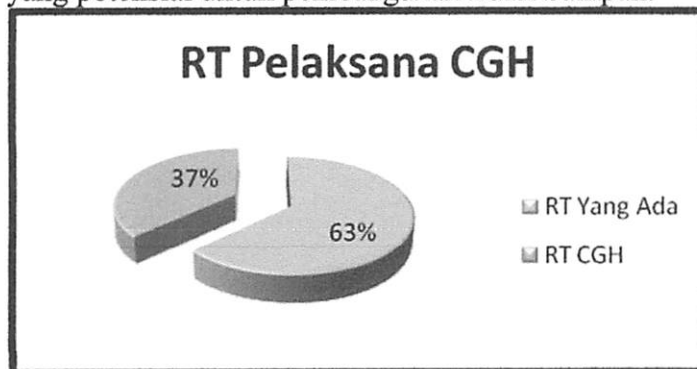


Meningkatnya kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman RT yang menerapkan CGH hanya 20 RT dari 26 RT yang ada sedangkan pemukiman PHBS untuk Tahun 2014 adalah selanjutnya daftar berikut :



NO	URAIAN INDIKATOR	PROSENTASE
1	Pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan	100%
2	Bayi dan beri ASI eksklusif	74%
3	Menimbang bayi/balita	83,70%
4	Ketersediaan air bersih	100%
5	Mencuci Tangan	88.5%
6	Menggunakan Jamban	100%
7	Memberantas Jentik	84,59%
8	Makan buah dan sayur setiap hari	90,25%
9	Melakukan Aktifitas fisik (olahraga) setiap hari	98,60%
10	Tidak Merokok	70,50%

Untuk Bank Sampah belum ada yang terbentuk, mengingat ketiadaan lahan yang potensial untuk pembangunan Bank Sampah.

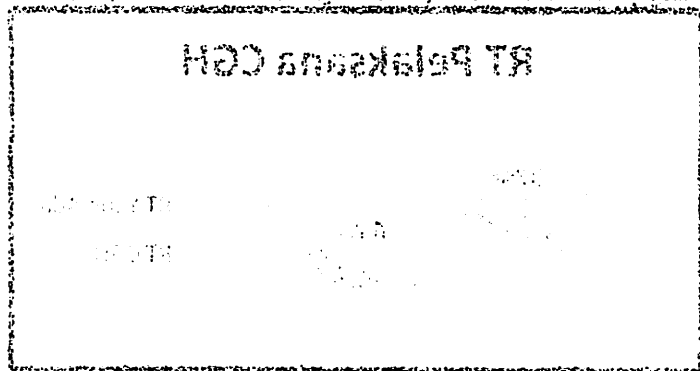


Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian target	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	1	Jumlah Keluarga Miskin	KK	119	317	266,39	
		2	Jumlah UMKM	Buah	115	100	420	
		3	Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif	Orang	30	26	100	
		4	Jumlah peserta Lomba STQ	Orang	30	25	58	
		5	Jumlah anak putus sekolah	Orang	0	0	100	
2	Meningkatnya	1	Jumlah bayi/balita dengan	Orang	0	0	100	

NO	URAIAN INDIKATOR	PROSENTASE
1	Partisipasi pelayanan oleh 1 orang Kecamatan	100%
2	Bayi dan balita ASI eksklusif	74%
3	Meningkatnya bayi balita	82,70%
4	Ketersediaan air bersih	100%
5	Masarakat Terang	88,3%
6	Menggunakan jamban	100%
7	Membaca surat jamak	81,50%
8	Makan buah dan sayur setiap hari	90,2%
9	Melakukan Aktivitas Fisik (olahraga) setiap hari	98,60%
10	Tidak Merokok	70,50%

Untuk Bank Sampah belum ada yang terencana. Kegiatan pelatihan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan Bank Sampah.



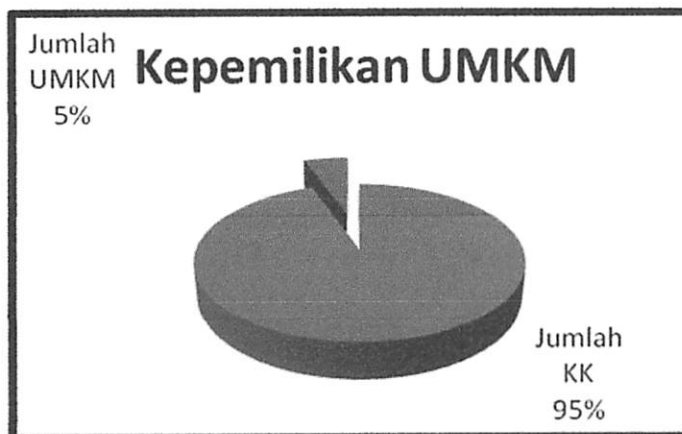
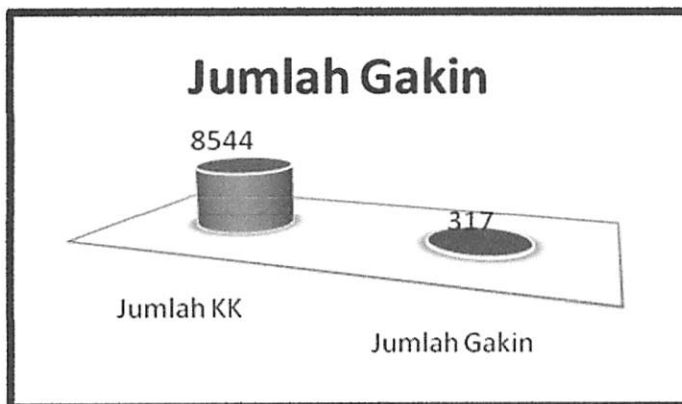
Matriks : Menunjukkan pencapaian masyarakat

No	Uraian	Indikator Kinerja	Sasaran	Target	Realisasi	No
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya (perekonomian dan) Kesejahteraan masyarakat	1 Jumlah Keluarga Miskin	KK	110	111	1
		2 Jumlah UMKM	Buah	112	100	2
		3 Jumlah Program PKK Kelurahan yang aktif	Orang	30	30	3
		4 Jumlah peserta Lomba STQ	Orang	30	32	4
		5 Jumlah anak putus sekolah	Orang	0	0	5
2	Meningkatnya	1 Jumlah bayi balita dengan	Orang	0	0	6

kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	gizi buruk				
	2 Jumlah bayi dan balita yang meninggal	Orang	0	0	100
	3 Jumlah partisipasi dalam kepesertaan program KB	PUS	5563	4895	87,99
	4 Jumlah Posyandu aktif	Buah	26	20	86,20
	5 Angka kematian Ibu melahirkan	Orang	0	0	100

1. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

Jumlah Gakin masih sebanyak 56 KK belum dapat dientaskan seluruhnya, bentuk pelatihan bagi keluarga miskin masih perlu diberikan agar para gakin dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan akhirnya membuka kesempatan mereka untuk berusaha dan memperbaiki perekonomiannya. Pada akhir tahun 2014, telah dilaksanakan inventarisasi atas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Gunungsamarinda Baru. Dari target 115 UMKM ternyata telah terinventarisir sebanyak 100 UMKM.



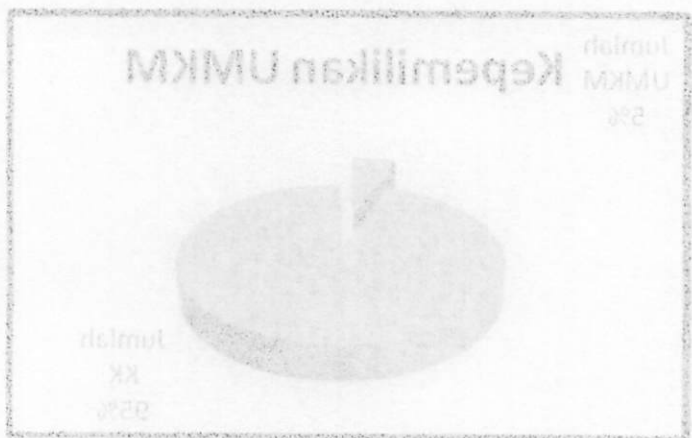
2. Meningkatnya kesehatan Ibu, bayi dan Balita

Kesehatan Ibu, bayi dan balita di Kelurahan Gunungsamarinda Baru cukup baik, untuk target Akseptor KB belum semua Pasangan Usia Subur (PUS) ikut ber KB dapat dikarenakan keinginan para PUS untuk memiliki anak sehingga tidak ikut berKB. Jumlah posyandu aktif adalah sekitar 20 posyandu, tidak semua RT

100	0	0	Orang	2. Jumlah bayi dan balita yang meninggal	Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita
87,99	4892	2263	PUS	3. Jumlah partisipasi dalam kesempatan program KB	
86,20	20	26	Bahw	4. Jumlah Posyandu aktif	
100	0	0	Orang	5. Angka kematian Ibu melahirkan	

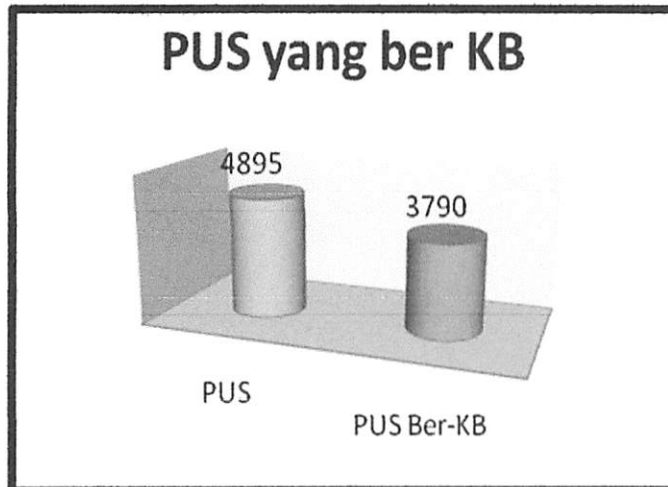
1. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

Jumlah Gakin masih sebanyak 26 KK belum dapat dibantu seluruhnya, banyak pelatihan bagi keluarga miskin masih perlu diberikan agar para gakin dapat mendapat pengetahuan, keterampilan dan akhirnya membuka kesempatan mereka untuk berusaha dan memperbaiki ekonominya. Pada akhir tahun 2014, telah dilaksanakan investasi atas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Gunungsumbu Baru. Dari target 12 UMKM ternyata telah terinvestasi sebanyak 100 UMKM.



2. Meningkatkan kesehatan Ibu, bayi dan Balita
 Kesehatan Ibu, bayi dan balita di Kelurahan Gunungsumbu Baru cukup baik, untuk target Akseptor KB belum semua Pasangan Usia Subur (PUS) ikut per KB dapat dikarenakan keinginan para PUS untuk memiliki anak sehingga tidak ikut per KB. Jumlah posyandu aktif adalah sekitar 20 posyandu, tidak semua RT

memiliki Posyandu karena jumlah bayi dan balita yang masih kurang sehingga beberapa RT bergabung menjadi satu posyandu.

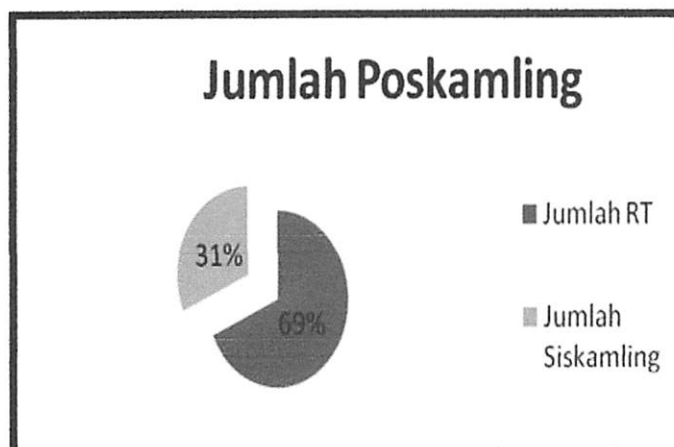


Misi 4 : Meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan

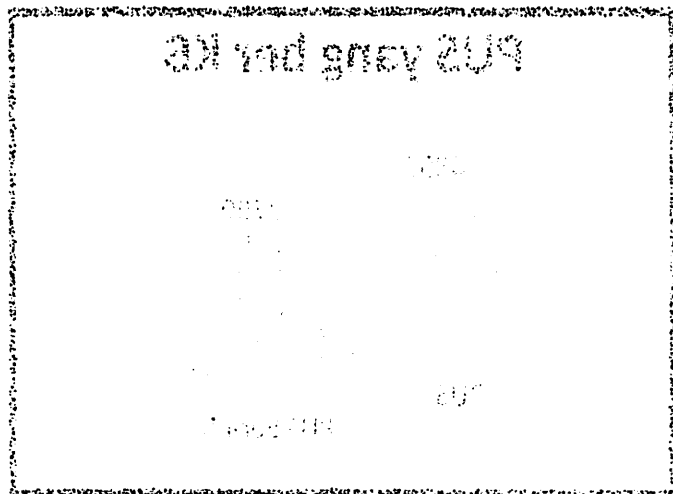
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian target	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1 Jumlah keaktifan Pos Kamling	Buah	26	40	45,98	
		2 Angka kriminalitas di wilayah kelurahan	kali	0	0	0	

Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan

Dari 26 RT yang ada tidak semua membuat kelompok Siskamling. Hanya 20 RT saja yang aktif menjalankan Siskamling hal ini dapat disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan secara swadaya.



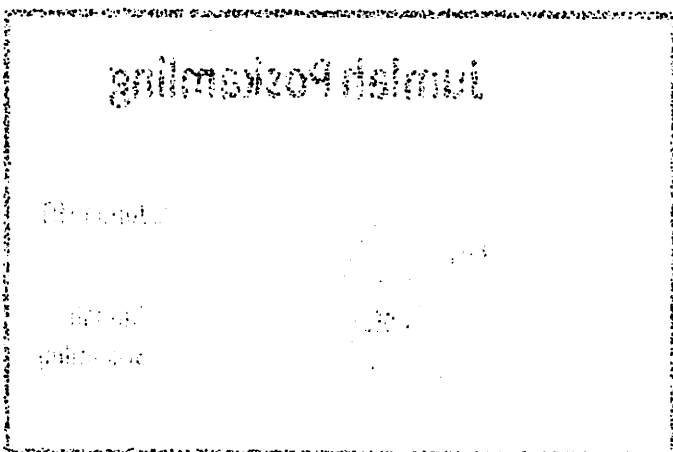
berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sejenis.



Gambar 1. Rata-rata Nilai Penelitian dan Penelitian Lain

No	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian
1	10	20	30	40	50	60
2	70	80	90	100	110	120

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sejenis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sejenis.



**A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Anggaran dan realisasi keuangan baik dana rutin maupun dana pembangunan Kelurahan Gunungsamarinda Baru Kecamatan Balikpapan Tengah untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut :

I. Anggaran Rutin			Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	Rp	1.575.216.000,00	1.115.835.754,00	89,92
2.	Belanja Operasional dan Pelaksanaan Program Kerja	Rp	951.908.200,00	769.298.624,00	94,60
Jumlah		Rp	2.527.124.200,00	1.885.134.378,00	88,95

Dalam pelaksanaan penyerapan anggaran di Tahun 2014, Kelurahan Gunungsamarinda Baru berupaya agar dana yang ada dapat terserap seoptimal mungkin dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dalam penggunaannya.

Anggaran Belanja Langsung yang meliputi kegiatan operasional rutin dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan pembangunan ditetapkan sebesar Rp. 951.908.200,00. Meliputi 31 kegiatan yang telah dapat terlaksana seluruhnya berkisar 94,60%. Anggaran yang terserap adalah Rp. 769.298.200,00 atau berkisar 94,60 %.

Untuk Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.575.216.000,00, terlaksana secara fisik sebesar 100% dan dana yang terserap adalah Rp. 1.115.835.754,00 atau 89,92%. Dengan demikian dari Jumlah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, jumlah dana yang terserap adalah Rp. 1.885.134.378,00 atau 88,95%.

Dilihat dari capaian Penetapan Kinerja yang tercantum dalam Pengukuran Kinerja, maka Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan dapat digambarkan sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan dan Kelembagaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Target	Realisasi	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Persentase keluhan atas Pelayanan yang ditindaklanjuti	12 keluhan/bulan	2 keluhan masuk	100	1. Menyediakan papan informasi mengenai pelayanan dan prosedurnya 2. Membuat dan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) terhadap pelayanan 3. Menyediakan kotak saran/achan 4. Penyusunan Profile Kelurahan 6. Penyusunan AKIP 7. Sarana Kesekretariatan PPK dan PPS dalam rangka Pilgub Kaltim 2013 dan Pemilu Legislatif/Pilpres 2014	Rp 224.379.000,00	Rp 219.016.069,00	100,00 97,61
	2. Rata-rata waktu untuk menyelesaikan kasus pengantar/keputusan	10 menit/surat	10 menit/surat	100				
	3. Jumlah Surat Pengantar /Keputusan Bidang Pelayanan	9250 surat	4890 surat	52,86				
2. Peningkatan Peran Serta RT dan Masyarakat	1. Persentase kehadiran pada rapat Koordinasi RT	87 orang	87 orang	100	1. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT 2. Pembinaan, penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi RT tertib 3. Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	Rp 534.250.000,00	Rp 534.130.000,00	99,98
	2 RT yang mengelola administrasi dengan baik	87 RT	45 RT	51,72				
					Rp 28.090.000,00	Rp 24.872.600,00	88,55	

A. PENYERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan realisasi keuangan baik dalam maupun di luar negeri dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai berikut :

No	Kategori	Anggaran	Realisasi	
			2014	2013
1.	Belanja Pegawai	Rp. 1.575.210.000,00	Rp. 1.112.835.344,00	70,72
2.	Belanja Operasional dan Belanja Program	Rp. 921.908.300,00	Rp. 799.298.824,00	86,80
	Jumlah	Rp. 2.497.118.300,00	Rp. 1.912.134.168,00	76,62

Salah satu pelaksanaan program anggaran di Tahun 2014. Realisasi pertanggungjawaban keuangan yang ada dapat tercapai sebagian mungkin dengan tetap memelihara fungsi efisiensi dalam pemerintahan. Anggaran belanja yang menjadi kegiatan operasional rutin dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan pertanggungjawaban sebesar Rp. 921.908.300,00. Anggaran di kegiatan yang telah dilaksanakan seluruhnya sebesar Rp. 799.298.824,00. Anggaran yang tercapai adalah Rp. 799.298.824,00 atau sebesar 86,80%. Untuk anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.575.210.000,00 realisasinya sebesar Rp. 1.112.835.344,00 atau yang tercapai adalah Rp. 1.112.835.344,00 atau sebesar 70,72%. Dengan demikian dari jumlah Belanja Tidak Langsung yang tercapai adalah Rp. 1.112.835.344,00 atau sebesar 70,72%.

Dilihat dari capaian Kinerja yang tercapai dalam Program Kerja, maka Program Kerja Akuntabilitas Keuangan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1 : Matriks Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan dan Kelengkapan

No	Kategori	Keterangan	Kategori		Kategori	Kategori
			1	2		
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10



Misi 2 : Meningkatkan kebersihan dan Kesehatan Lingkungan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		TARGET	Realisasi				
Meningkatnya perilaku masyarakat dalam pemertanian dan kesehatan lingkungan	1. Jumlah RT yang mempunyai tim kesehatan lingkungan 2. Jumlah RT yang mempunyai tim kesehatan lingkungan 3. Jumlah RT yang mempunyai tim kesehatan lingkungan	100	Rp 2.250.000.000	1. Pembentukan tim kesehatan lingkungan untuk pemertanian dan kesehatan lingkungan	Rp 266.621.000,00	270.315.680,00	94,31
		100	Rp 2.250.000.000	2. Pelaksanaan pemertanian dan kesehatan lingkungan	Rp 10.000.000,00	Rp 9.049.450,00	90,49
		120 orang	80 orang	2. Pelaksanaan pemertanian dan kesehatan lingkungan	Rp 53.022.000,00	Rp 63.777.250,00	98,07
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemertanian dan kesehatan lingkungan	1. Jumlah RT yang mempunyai tim kesehatan lingkungan 2. Jumlah KK yang mempunyai tim kesehatan lingkungan 3. Jumlah RT yang mempunyai tim kesehatan lingkungan	26 RT	15 RT	1. Pelaksanaan kegiatan pemertanian dan kesehatan lingkungan	Rp 56.935.000,00	Rp 60.850.712,00	92,25
		7857 KK	4750 KK	2. Pelaksanaan kegiatan pemertanian dan kesehatan lingkungan	Rp 60.380.000,00	Rp 63.777.250,00	98,07
		3 Unit	1	3. Pelaksanaan kegiatan pemertanian dan kesehatan lingkungan	Rp 42.000.000,00	Rp 40.884.500,00	94,43

Untuk penyerapan anggaran yang mendukung misi ke-2, penyerapan anggaran mencapai di atas 90 %, yaitu untuk kegiatan pemberian stimulant untuk perbaikan pemeliharaan lingkungan pemukiman Kelurahan sebesar 94,31 %, kegiatan penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan sebesar 90,49%, Melaksanakan Kerja Bhakti Massal 98,07%, Pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, pemertanian/tindakan pengupasan lahan tanpa izin sebesar 92,25% dan untuk kegiatan pengelolaan/pengangkutan dan kebersihan drainase terserap sebesar 96,43%.

Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		TARGET	Realisasi				
Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	1. Jumlah Kelurahan Miskin 2. Jumlah UMRM 3. Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif 4. Jumlah Pemula Lomba STQ 5. Jumlah Anak Panti Sosial	119 KK	317 KK	1. Penertarikan dan pendataan penduduk terkait program pengembangan kesehatan	Rp 10.000.000,00	Rp 6.672.000,00	64,72
		20 orang	20 orang	2. Pembinaan dan pelatihan penyelenggaraan Timus dan Fungsi PKK Kelurahan	Rp 25.000.000,00	Rp 24.900.000,00	99,60
		50 orang	29 orang	3. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pembinaan UMRM	Rp 15.000.000,00	Rp 14.975.850,00	99,84
		0	0	4. Pembinaan dan pembinaan UMRM bekerjasama dengan instansi terkait seperti Disperindag, BKM/PPCB dan PPM/Mantri	Rp 25.000.000,00	Rp 24.900.000,00	99,60
		0	0	5. Pembinaan dan pembinaan UMRM bekerjasama dengan instansi terkait seperti Disperindag, BKM/PPCB dan PPM/Mantri	Rp 25.000.000,00	Rp 24.900.000,00	99,60
Meningkatnya kesehatan lingkungan dan mutu lingkungan	1. Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk 2. Angka Kematian Balita 3. Angka Kematian Ibu Melahirkan 4. Jumlah Pemula KB 5. Jumlah Pemula AKB	0	0	1. Fasilitas Pengembangan Posyandu di Kelurahan	Rp 26.160.000,00	Rp 26.041.400,00	99,55
		0	0	2. Mengadakan kegiatan KB melalui Pengus KB Kelurahan	0	0	100,00
		0	0	3. Mengadakan kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	0	0	100,00
		4855 PLUS	4855 PLUS	4. Mengadakan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)	87.990.000,00	87.990.000,00	100,00
		87 Unit	75 Unit	5. Mengadakan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)	86.200.000,00	86.200.000,00	100,00

Untuk penyerapan anggaran yang mendukung Misi ke -3, terdapat kegiatan yang hanya terserap sebesar 66,72 %. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan jumlah hari dalam pelaksanaan kegiatan. Sebelumnya di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah ditetapkan selama 20 hari, namun ternyata di lapangan hanya berjalan selama 13 hari, sehingga terjadi efisiensi dalam pemberian honorarium Tim.



Misi 4 : Meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Target	Realisasi	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah keaktifan pos kamling	26 RT	20 RT	45,98	1. Koordinasi dan penyelenggaraan ketertiban dan ketenangan umum di wilayah Kelurahan 2. Melaksanakan koordinasi intensif dengan unsur RT, Babinsa, dan Babinkamtibmas	Rp 71.760.000,00	Rp 58.207.000,00	81,11
	2. Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	0	0	0				100,00

Penyerapan anggaran untuk misi ke-4 terletak pada kegiatan Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan yaitu sebesar 81,11%.

Kinerja Keuangan yang tergambar melalui penyerapan anggaran terlihat bahwa jumlah anggaran yang terserap untuk mendukung indikator kinerja dari Misi Kelurahan Gunungsamarinda Baru di tahun 2014 adalah 94,60%.

Matriks : Matriks Kelembagaan dan Kelembagaan Desa

No	Kategori	Sub-kategori	Indikator	Skor			Kategori	Sub-kategori
				1	2	3		
1	Kelembagaan	Kelembagaan Desa	Kelembagaan Desa	100	100	100	Kelembagaan	Kelembagaan Desa
Kelembagaan Desa			100	100	100			
Kelembagaan Desa			100	100	100			

Kelembagaan dan Kelembagaan Desa adalah lembaga yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya.

Kelembagaan dan Kelembagaan Desa adalah lembaga yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya.



BAB VI PENUTUP

A KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Gunungsamarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2014 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2013. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta petunjuk dari Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan pemerintah kota Balikpapan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu terlaksananya Good Governance dan Clean Government yang melibatkan Stake Holder yang ada sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, berdaya guna dan berhasil guna.

Akhirnya, semoga LAKIP ini dapat dapat berguna untuk menjadi bahan informasi sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat.

B. SARAN

Dalam rangka peningkatan kemampuan kami dalam membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), kami mengharapkan ada evaluasi atas LAKIP yang telah kami buat agar diketahui kekurangan dan kelemahan dalam penulisan laporan ini. Bimbingan dan arahan yang benar sangatlah kami harapkan.

BAB VI PENUTUP

A. PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2014 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2014. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/KR/2007 tanggal 23 Januari 2007. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 merupakan Laporan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta petunjuk dan pedoman penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan pemerintahan kota Balikpapan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memuat pelaksanaan Good Governance dan Open Government yang melibatkan Stakeholder yang ada sehingga ke depan akan tercipta transparansi dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, berdaya guna dan berhasil guna.

Akhirnya, semoga LAKIP ini dapat dapat berguna untuk menjadi bahan informasi sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat.

B. SARAN

Tujuan rangka peningkatan kemampuan kami dalam membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kami pertanggungjawabkan atas evaluasi atas LAKIP yang telah kami buat agar diketahui keakuratan dan ketepatan dalam pembuatan laporan ini. Bimbingan dan arahan yang sangat diharapkan kami harapkan.

**PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Kelurahan Gunung Samarinda Baru
: 2014

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Program/Kegiatan (4)	Anggaran (5)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1. Prosentase keluhan atas Pelayanan yang ditindaklanjuti	12 keluhan/tahun	1. Menyediakan papan informasi mengenai pelayanan dan prosedurnya	
	2. Rata-rata waktu penyelesaian surat pengantar/surat keterangan	10 menit/surat	2. Membuat dan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) terhadap pelayanan	
	3. Jumlah Surat Pengantar /Keterangan Bidang Pelayanan	9250 surat	3. Menyediakan kotak saran/aduan	
			4 Penyusunan Profile Kelurahan	Rp 3,325,000.00
			6 Penyusunan AKIP	
2. Peningkatan Peran Serta RT dan Masyarakat	1. Persentase kehadiran pada rapat Koordinasi RT	60 orang	1. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Rp 161,525,000.00
	2 RT yang mengelola administrasi dengan baik	26 RT	2. Pembinaan, penilaian dan pemberian reward pengelola administrasi RT terbaik	Rp -
			3 Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	Rp 30,535,000.00
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan & pembangunan	1. Jumlah dana Partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan	Rp 293,817,000	1. Pemberian bantuan stimulan untuk perbaikan pemeliharaan lingkungan pemukiman Kelurahan	Rp 271,615,000.00
	2. Jumlah peserta yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah kelurahan	150 orang	2. Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan	Rp 9,155,000.00
4. Meningkatnya kualitas kebersihan & kesehatan lingkungan pemukiman	1. Jumlah RT yang menerapkan konsep CGH	26 RT	1. Melaksanakan Kerja Bakti Massal (KBM)	Rp 24,973,000.00
	2. Jumlah KK yang menerapkan PHBS	5.576 KK	2. Pengawas dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Rp 40,505,000.00
	3. Jumlah Bank Sampah	0	3. Pengelolaan/Pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	Rp 51,585,000.00
5. Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1. Jumlah Keluarga Miskin	50 KK	1. Pemutakhiran data penduduk terkait program Pengembangan kesejahteraan sosial	Rp 6,925,000.00
	2. Jumlah UMKM	15	2. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	Rp 25,000,000.00
	3. Jumlah Pengurus PKK Kelurahan yang aktif	20 orang	3. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Rp 14,905,000.00
	4. Jumlah Peserta Lomba STQ	50 orang	4. Pendataan dan Pembinaan UMKM bekerjasama dengan instansi terkait seperti Disperindagkop, BPMPPKB dan PNPM Mandiri,	
	5. Jumlah Anak Putus Sekolah	0	5. Pendataan dan Pembinaan Gakin bekerjasama dengan instansi terkait seperti Disdukcapil, Bappeda dan Disnakersos	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6 Meningkatkan kesehatan Ibu, bayi dan balita	1. Jumlah bayi/balita dengan gizi buruk	0	1. Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Rp 36,000,000.00
	2. Angka Kematian Balita	0	2. Menggiatkan kegiatan KB melalui Petugas KB Kelurahan	
	3. Angka Kematian Ibu Melahirkan	0	3. Menggiatkan kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	
	4. Jumlah Peserta KB	4320 PUS	4. Menggiatkan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)	
	5. Jumlah Posyandu Aktif	26 Unit		
7 Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Jumlah keaktifan pos kamling	26 RT	1. Koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan	Rp 107,645,000.00
	2. Angka kriminalitas di wilayah Kelurahan	0	2. Melaksanakan koordinasi intensif dengan unsur RT, Babinsa, dan Babinkamtibmas	

Jumlah Anggaran Belanja **Rp 2,527,124,200**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	: Rp	221,748,200.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	: Rp	257,975,000.00
Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	: Rp	191,525,000.00
Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	: Rp	324,352,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	: Rp	36,000,000.00
Program Pengembangan Data/Informasi	: Rp	3,325,000.00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	: Rp	9,155,000.00
Program Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	: Rp	65,478,000.00
Program Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah/Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase Lingkungan Kelurahan	: Rp	51,585,000.00
Program Penataan Administrasi Kependudukan	: Rp	6,925,000.00
Program Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan	: Rp	25,000,000.00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	: Rp	14,905,000.00
Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	: Rp	107,645,000.00



Balikpapan, 27 Januari 2014
 Lurah Gunung Samarinda Baru

 Muji Unggul Subowo
 NIP 19650621 198601 1 001



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 KELURAHAN GUNUNGSAMARINDA BARU

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUJI UNGGUL SUBOWO**
Jabatan : **LURAH GUNUNGSAMARINDA BARU**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**
Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. Akan mewujudkan target kinerja tahun 2014 sesuai lampiran perjanjian ini dalam mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. Untuk lebihantisipasi, meningkatkan partisipasi dan lebih efisien dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana angka 1 per 6 bulan kepada Walikota.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 27 Januari 2014

Pihak Kedua,

H.M. RIZAL EFFENDI

Pihak Pertama,

MUJI UNGGUL SUBOWO

